

Konsep Negara Ideal Plato dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Kepemimpinan Era Kontemporer

The Concept of The Ideal State and Its Implications For Contemporary Leadership Education

Rahmad Alkhadafi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author: rahmadalkhadafi7@gmail.com

Abstract: *The purpose of this paper is to explore the principles of education in Plato's ideal state concept and its implications to leadership education in the contemporary era. This research uses a qualitative method based on literature search. The research found that Plato's ideal state is based on education and virtue, with the main goal of creating justice and happiness for all people. Plato formulated an ideal state led by a philosopher, who has the intellectual capacity and high morality to manage the state fairly. Plato strongly emphasized the importance of education in an ideal state, with education will make people moral, able to think critically and systematically. Plato viewed education as the main foundation for producing superior individuals, not only in terms of intellect, but also in terms of morality and ethics. His philosophical education aims to create individuals with wisdom (sophia), courage (andreia), self-control (sophrosyne), and justice (dikaiosyne). These four values are the main pillars in producing leaders who are wise and able to act in the interests of society fairly. In the contemporary context, this approach can be applied through an education system that emphasizes character development, critical thinking, and a deep understanding of ethical values.*

Keywords: *Plato, Philosopher, State, Education.*

Abstrak: Tujuan dari karya tulis ini adalah untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip pendidikan dalam konsep negara ideal Plato dan implikasinya terhadap pendidikan kepemimpinan di era kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berlandaskan penelusuran kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa negara ideal menurut Plato berasaskan pendidikan dan kebajikan, dengan tujuan utama menciptakan keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Plato merumuskan bentuk negara ideal yang dipimpin oleh seorang filsuf, yang memiliki kapasitas intelektual dan moralitas tinggi untuk mengelola negara secara adil. Plato

sangat menekankan pentingnya pendidikan dalam sebuah negara yang ideal, dengan adanya pendidikan akan menjadikan masyarakat bermoral, mampu berfikir kritis dan sistematis. Plato memandang pendidikan sebagai fondasi utama untuk mencetak individu yang unggul, tidak hanya dalam hal intelektual, tetapi juga dalam hal moralitas dan etika. Pendidikan yang ia gagas bertujuan untuk menciptakan individu yang memiliki kebijaksanaan (*sophia*), keberanian (*andreia*), pengendalian diri (*sophrosyne*), dan keadilan (*dikaioisyne*). Keempat nilai ini merupakan pilar utama dalam mencetak pemimpin yang bijaksana dan mampu bertindak demi kepentingan masyarakat secara adil. Dalam konteks kontemporer, pendekatan ini dapat diterapkan melalui sistem pendidikan yang menekankan pengembangan karakter, kemampuan berpikir kritis, dan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai etika.

Kata kunci : Plato, Filsuf, Negara, Pendidikan



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

Pendahuluan

Dunia saat ini tidak kekurangan pemimpin yang cerdas dan unggul secara teknis. Namun, yang benar-benar dibutuhkan adalah pemimpin dengan integritas moral yang kuat—karakteristik yang ironisnya semakin sulit ditemukan (Priyanto, 2020). Dalam menghadapi tantangan global seperti ketimpangan sosial, krisis moralitas, dan ancaman perubahan iklim, kecerdasan saja tidak cukup. Dunia membutuhkan sosok pemimpin yang mampu memadukan kompetensi teknis dengan kedalaman moral, seseorang yang tidak hanya memahami persoalan tetapi juga memiliki komitmen untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan bersama (Syaiful Sagala, 2018). Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimana membentuk pemimpin yang mampu memenuhi kedua aspek tersebut? Merujuk pada konsep *philosopher-king* yang digagas Plato dalam *Republic*, pendidikan menjadi kunci utama (Plato, 2013). Plato menegaskan bahwa pemimpin ideal harus memiliki visi keadilan dan kebijaksanaan, yang diperoleh melalui pendidikan moral dan intelektual.

Kajian terdahulu tentang pemikiran Plato mengenai negara ideal mengungkap berbagai sudut pandang menarik, dengan sejumlah studi yang menyoroti aspek-aspek berbeda dari filsafatnya. Penelitian yang dilakukan Alim Roswanto menemukan bahwa pemikiran Plato dan Aristoteles mengenai negara ideal berfokus pada penciptaan negara yang adil dan bahagia, namun dengan pendekatan yang berbeda. Plato mengusulkan negara yang adil di bawah bimbingan para raja-filsuf, sementara Aristoteles lebih

menekankan pada naluri sosial-politik manusia dalam menciptakan negara yang baik (Roswanto, 2015). Selanjutnya penelitian yang dilakukan Richo B. Mahendra yang membandingkan pemikiran Plato dan Al-Farabi, ia menemukan perbedaan signifikan dalam pandangan keduanya mengenai pemimpin ideal, tujuan negara, dan klasifikasi rezim politik. Mahendra menunjukkan bahwa Al-Farabi menggabungkan akidah dan filsafat, sedangkan Plato mengutamakan kebajikan dan pengetahuan dalam kepemimpinan (Mahendra, 2021).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Leni Andariati yang menemukan bahwa negara ideal menurut Plato didasarkan pada pendidikan dan kebajikan untuk mencapai keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh warga negara. Plato menawarkan bentuk negara Aristokrasi, yang dipimpin oleh seorang filosof atau orang yang memiliki pengetahuan filsafat (Andariati, 2020). Selanjutnya penelitian Andika Setiawan mengintegrasikan filsafat pendidikan politik Plato dengan kurikulum 2013, menawarkan program pendidikan untuk mencetak pemimpin yang baik, seperti pembacaan teks Al-Barzanji, pencak silat, dan diskusi di setiap pembelajaran. Kajian-kajian ini memberikan perspektif yang lebih luas mengenai pemikiran Plato, terutama dalam hal pendidikan sebagai dasar kepemimpinan etis (Setiawan, 2021).

Tujuan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip pendidikan dalam konsep negara ideal Plato, yang memiliki relevansi signifikan bagi pendidikan kepemimpinan di era kontemporer. Plato memandang pendidikan sebagai sebuah proses holistik yang tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membangun karakter moral yang mendalam dan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Dalam pandangan Plato, pendidikan adalah sarana utama untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas dan berorientasi pada kebaikan bersama. Melalui artikel ini, diharapkan dapat ditemukan solusi terhadap krisis kepemimpinan global yang menuntut integritas, visi, dan tanggung jawab sosial.

Bahwa penerapan prinsip-prinsip pendidikan Plato dalam konteks kontemporer dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kebijaksanaan dan tanggung jawab moral. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi landasan untuk melahirkan kepemimpinan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan bersama. Lebih jauh, implementasi prinsip-prinsip ini dapat memberikan kerangka kerja bagi reformasi pendidikan kepemimpinan, yang mengintegrasikan pengembangan kecerdasan emosional, keterampilan berpikir kritis, dan wawasan filosofis. Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya menghasilkan

individu yang mampu memecahkan masalah teknis, tetapi juga mampu membuat keputusan yang bijak, yang pada akhirnya berdampak positif bagi masyarakat luas.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research)(Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, 1990). Sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa buku *The Republic* karya Plato dan data sekunder, seperti artikel, jurnal, serta buku-buku lain yang mendukung penelitian ini untuk memperkaya analisis dengan konteks tambahan dan pandangan dari peneliti lain. Data dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menganalisis berbagai dokumen yang relevan, seperti buku, artikel, dan jurnal, guna mendapatkan informasi yang mendukung argumentasi dan temuan penelitian(Kaelan, 2005). Untuk menganalisis data, digunakan metode deskriptif-analitik, yang tidak hanya mendeskripsikan isi sumber, tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikannya untuk menemukan hubungan, pola, dan relevansi dengan topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Biografi dan Perjalanan Intelektual Plato

Plato adalah salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah filsafat Yunani Kuno, yang gagasan-gagasannya terus memengaruhi pemikiran Barat hingga saat ini. Ia lahir pada tahun 427 SM di Athena dari keluarga aristokrat yang sangat terpandang. Latar belakang keluarganya memainkan peran penting dalam pembentukan pemikiran politiknya(Plato, 2013). Ayahnya, Ariston, merupakan keturunan Raja Kodrus, raja terakhir Athena yang dihormati karena kemampuan kepemimpinannya. Sementara itu, ibunya, Periktione, adalah keturunan Solon, seorang negarawan dan pembuat undang-undang legendaris yang dikenal sebagai pendiri dasar hukum Athena. Dengan latar belakang keturunan yang demikian, Plato tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan pengaruh politik dan intelektual(Mohammad Hatta, 1996). Nama aslinya adalah Aristokles, tetapi ia lebih dikenal dengan julukan "Plato," yang diberikan oleh guru senamnya karena dahi dan bahunya yang lebar—kata "Platon" dalam bahasa Yunani berarti "lebar." Julukan ini melekat hingga nama aslinya nyaris terlupakan, dan ia dikenal di seluruh dunia dengan nama tersebut.

Sebagai pengikut setia Socrates, Plato memperoleh banyak pelajaran berharga selama bertahun-tahun belajar langsung dari sang guru. Socrates, yang terkenal karena kebijaksanaannya dan metode pengajaran yang unik,

memiliki pengaruh besar dalam membentuk pemikiran Plato, khususnya melalui metode dialektika(Harun Hadiwijoyo, 1993). Metode ini melibatkan dialog dan pertanyaan kritis untuk menggali kebenaran secara mendalam, sebuah pendekatan yang kemudian menjadi inti dari filsafat Plato. Melalui interaksi dengan Socrates, Plato tidak hanya belajar untuk berpikir secara kritis, tetapi juga memahami pentingnya nilai-nilai seperti keadilan, kebajikan, dan kebenaran dalam kehidupan individu dan masyarakat. Namun, kematian tragis Socrates yang dihukum mati oleh pemerintah Athena membuat Plato kecewa dengan sistem politik yang ada(Mohammad Hatta, 1996). Kekecewaan inilah yang kemudian mendorong Plato untuk mengeksplorasi konsep keadilan, kebajikan, dan negara ideal dalam karya-karyanya(Plato, 2013).

Setelah kematian Socrates, Plato melakukan perjalanan intelektual ke berbagai wilayah, termasuk Italia dan Sicilia, untuk memperdalam pengetahuannya(K. Bertens, Johanis Ohoitmur, 2018). Perjalanan ini tidak hanya memperkaya pandangan filosofisnya, tetapi juga memberinya wawasan baru tentang sistem pemerintahan dan pendidikan di berbagai tempat. Pada usia empat puluh tahun, sekembalinya dari pengembaraannya, Plato mendirikan Akademia di Athena, sekolah pertama yang didedikasikan untuk filsafat dan ilmu pengetahuan. Akademia menjadi pusat pendidikan intelektual yang berpengaruh selama berabad-abad, dan di sinilah Plato mengajarkan gagasan tentang dunia ide kepada murid-muridnya, termasuk Aristoteles, yang kelak juga menjadi filsuf besar(Mohammad Hatta, 1996).

Pemikiran Plato sangat berpengaruh, terutama teorinya tentang dunia ide. Menurut Plato, dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari realitas yang lebih tinggi, yaitu dunia ide yang sempurna dan abadi. Gagasan ini menjadi titik tolak bagi pemikiran filosofis Aristoteles yang kemudian mengembangkan pandangan yang berbeda, meskipun tetap dipengaruhi oleh gurunya. Di samping itu, pemikiran Plato juga menjadi sumber inspirasi bagi kaum rasionalis di era modern dan turut memengaruhi filsafat Islam, terutama melalui pemikir seperti Al-Farabi dan Ibn Sina yang mengadaptasi gagasan Plato ke dalam kerangka filsafat Islam(Mahendra, 2021).

Konsep Negara Ideal Plato

Pemikiran filsafat politik Plato berangkat dari keyakinannya akan adanya suatu konsep masyarakat ideal yang didasarkan pada keadilan(Plato, 2013). Gagasan ini dikembangkan dalam karya utamanya, *The Republic* (Politeia), di mana Plato merumuskan suatu tatanan politik yang bertujuan menciptakan keadilan dalam kehidupan sosial. Dalam pandangan Plato, masyarakat ideal tidak hanya terbatas pada susunan politik atau struktur

sosial yang baik, tetapi juga merupakan cerminan dari manusia ideal yang hidup secara harmonis dengan prinsip-prinsip kebenaran dan kebajikan (Roswanto, 2015). Dengan demikian, konsep negara ideal Plato pada dasarnya adalah refleksi dari visi tentang bagaimana manusia seharusnya hidup dalam kebajikan.

Pemikiran Plato tentang negara ideal tidak terlepas dari pengalamannya terhadap situasi politik Yunani, khususnya Athena, pada masa hidupnya. Plato menyaksikan sendiri bagaimana negara digunakan oleh para penguasa sebagai alat untuk memenuhi ambisi pribadi mereka, tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat (Mohammad Hatta, 1996). Ketidakpuasan dan kekecewaannya terhadap situasi ini sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran politiknya. Ia melihat bahwa banyak pemimpin yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengelola negara demi kepentingan umum, justru bertindak secara korup dan tidak adil. Para penguasa ini menempatkan kepentingan pribadi mereka di atas kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya merusak tatanan sosial dan politik (Mohammad Hatta, 1996).

Kekecewaan Plato terhadap situasi politik pada zamannya semakin mendalam ketika ia melihat bahwa korupsi dan ketidakadilan telah menjadi hal yang biasa dalam pemerintahan (Mohammad Hatta, 1996). Dalam pandangannya, negara yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki kebijaksanaan akan selalu jatuh ke dalam kehancuran. Plato berpendapat bahwa penyebab utama dari kerusakan moral dan politik di Athena adalah karena para pemimpin tidak memiliki pengetahuan sejati tentang keadilan (Mohammad Hatta, 1996). Korupsi dan ketidakadilan yang merajalela menyebabkan ketidakstabilan sosial dan menimbulkan penderitaan bagi masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat keyakinan Plato bahwa perubahan mendasar dalam struktur pemerintahan sangat diperlukan.

Sebagai solusi atas problematika ini, Plato mengusulkan konsep negara ideal yang dipimpin oleh seorang filsuf-raja (Plato, 2013). Filsuf-raja menurut Plato adalah individu yang memiliki pengetahuan sejati tentang kebenaran dan keadilan, serta memiliki kebijaksanaan yang diperlukan untuk memimpin negara. Menurut Plato, hanya seorang filsuf yang memiliki kemampuan untuk memahami esensi dari keadilan dan kebaikan yang paling layak memimpin (Andariati, 2020). Dalam *The Republic*, Plato menggambarkan bagaimana negara yang ideal harus dibangun di atas prinsip keadilan, di mana setiap individu memiliki peran dan tugasnya masing-masing berdasarkan keahlian dan kebajikannya. Dalam negara ini, kelas-kelas

masyarakat dibagi menjadi tiga: para filsuf sebagai pemimpin, para penjaga sebagai pelindung, dan para pekerja sebagai penyedia kebutuhan ekonomi. Masing-masing kelas ini memiliki perannya dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan negara, di mana keadilan akan tercapai ketika setiap individu menjalankan tugasnya sesuai dengan keahliannya(Plato, 2013).

Plato juga menekankan pentingnya pendidikan dalam mewujudkan negara ideal(Plato, 2013). Baginya, pendidikan bukan hanya sarana untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga alat untuk membentuk karakter dan moralitas individu. Pendidikan yang baik akan menghasilkan pemimpin yang bijaksana dan rakyat yang mampu menjalani kehidupan yang adil. Plato percaya bahwa tanpa pendidikan yang benar, negara akan selalu dikuasai oleh ambisi pribadi dan kepentingan kelompok, yang pada akhirnya merusak tatanan sosial dan menghambat terciptanya keadilan(Plato, 2013).

Relevansi dengan Pendidikan Kepemimpinan Era Kontemporer

Pada era kontemporer, pendidikan kepemimpinan menghadapi tantangan besar dalam mencetak pemimpin yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral, visi yang jelas, dan kemampuan mengambil keputusan yang berorientasi pada keadilan(Fauzi, 2017). Tantangan ini muncul dari kompleksitas dunia yang semakin dinamis, ditambah dengan krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan yang sering kali terjebak dalam pragmatisme, konflik kepentingan, dan kurangnya visi jangka panjang(Sartini et al. 2024). Dalam konteks ini, konsep Plato tentang pendidikan filosofis memberikan inspirasi yang relevan untuk membangun paradigma baru dalam pendidikan kepemimpinan.

Plato memandang pendidikan sebagai fondasi utama untuk mencetak individu yang unggul, tidak hanya dalam hal intelektual, tetapi juga dalam hal moralitas dan etika. Pendidikan filosofis yang ia gagas bertujuan untuk menciptakan individu yang memiliki kebijaksanaan (*sophia*), keberanian (*andreia*), pengendalian diri (*sophrosyne*), dan keadilan (*dikaiosyne*)(Plato, 2013). Keempat nilai ini merupakan pilar utama dalam mencetak pemimpin yang bijaksana dan mampu bertindak demi kepentingan masyarakat secara adil. Dalam konteks kontemporer, pendekatan ini dapat diterapkan melalui sistem pendidikan yang menekankan pengembangan karakter, kemampuan berpikir kritis, dan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai etika.

Pengembangan karakter menjadi aspek krusial dalam membentuk pemimpin yang memiliki integritas moral. Pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada aspek teknis seperti penguasaan keterampilan manajerial atau pengetahuan ekonomi, melainkan harus melibatkan proses refleksi diri dan

pembentukan nilai-nilai kebajikan(Fridayani, 2021). Pemimpin dengan karakter kuat adalah individu yang mampu menjaga kejujuran, memegang teguh komitmen terhadap keadilan, dan bertindak dengan tanggung jawab, bahkan ketika dihadapkan pada situasi penuh tekanan dan tantangan moral. Dalam konteks dunia yang semakin kompleks dan sering kali dipenuhi dilema etis, karakter yang kokoh menjadi penentu utama keberlanjutan kepemimpinan yang kredibel. Oleh karena itu, integrasi antara pengembangan intelektual dan pembentukan karakter harus menjadi prioritas utama dalam setiap sistem pendidikan yang bertujuan mencetak pemimpin masa depan.

Kemampuan berpikir kritis merupakan elemen mendasar yang harus dimiliki dalam pendidikan kepemimpinan, terutama di era modern yang penuh dengan tantangan kompleks. Pemimpin masa kini dihadapkan pada berbagai isu global seperti ketidaksetaraan sosial, perubahan iklim, konflik geopolitik, hingga krisis ekonomi yang menuntut analisis mendalam dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Dalam situasi ini, berpikir kritis memungkinkan seorang pemimpin untuk mengevaluasi berbagai perspektif, mengenali bias, dan mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari setiap langkah yang diambil. Pendidikan filosofis ala Plato mengajarkan pemimpin untuk tidak hanya mengandalkan intuisi atau pragmatisme, tetapi juga mempertimbangkan dampak etis dari setiap tindakan yang diambil.

Pemahaman etika, sebagaimana yang ditekankan Plato, menjadi landasan untuk membentuk visi yang jelas dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Pemimpin yang memahami etika tidak hanya akan mengejar tujuan jangka pendek, tetapi juga akan memastikan bahwa tindakannya berkontribusi pada kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan(Taufik, 2018). Dalam konteks ini, konsep Plato tentang pendidikan filosofis sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem pendidikan modern, baik melalui kurikulum formal maupun pelatihan kepemimpinan khusus. Pendidikan formal dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran yang mendorong refleksi kritis, diskusi etis, dan studi kasus tentang dilema moral. Sementara itu, pelatihan kepemimpinan dapat dirancang untuk mengasah kemampuan peserta dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang etis dan inklusif(Alkhadafi, 2024).

Selain itu, hierarki peran dalam negara ideal Plato memberikan kerangka kerja yang relevan untuk diadaptasi menjadi sistem pelatihan kepemimpinan berbasis kompetensi dalam organisasi. Dalam model Plato, setiap individu menjalankan peran sesuai dengan kemampuan dan

keahliannya, dengan tujuan akhir terciptanya harmoni dan keadilan dalam negara. Konsep ini dapat diterapkan di lingkungan organisasi masa kini untuk memastikan bahwa setiap anggota tim ditempatkan di posisi yang paling sesuai dengan kompetensi mereka, sehingga dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan bersama.

Dalam adaptasi ini, pemimpin utama dalam organisasi dapat diibaratkan sebagai raja-filosof yang berfungsi sebagai pengarah strategis. Pemimpin ini bukan hanya bertanggung jawab untuk menetapkan visi dan misi organisasi, tetapi juga untuk menjalankan tugas dengan dasar etika dan kebijaksanaan. Mereka diharapkan mampu mengambil keputusan yang tidak hanya efektif secara operasional, tetapi juga berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, peran pemimpin mencakup tiga aspek utama: (1) pembimbing yang memastikan setiap anggota organisasi tumbuh sesuai potensinya, (2) penjaga moralitas yang memastikan bahwa kebijakan organisasi mencerminkan nilai-nilai etis, dan (3) perencana strategis yang mempersiapkan organisasi untuk menghadapi tantangan masa depan.

Implementasi sistem berbasis kompetensi ini dapat dilakukan melalui berbagai tahapan, seperti penilaian kemampuan individu, pelatihan berbasis kebutuhan spesifik, dan pemberian tanggung jawab yang sesuai dengan tingkat keahlian masing-masing. Sebagai contoh, individu dengan keahlian teknis mendalam dapat ditempatkan di posisi operasional, sementara individu dengan kemampuan berpikir strategis dan kepemimpinan yang kuat dapat diarahkan untuk menempati posisi manajerial atau eksekutif. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap individu tidak hanya bekerja secara efektif, tetapi juga merasa dihargai sesuai dengan keahliannya, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas organisasi.

Selain itu, konsep raja-filosof juga dapat menginspirasi pembentukan budaya kepemimpinan yang berfokus pada pembelajaran berkelanjutan dan refleksi. Pemimpin dalam organisasi modern dapat diharapkan untuk terus mengembangkan wawasan mereka melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga mereka dapat tetap relevan dan mampu memimpin dengan bijak di tengah dinamika global. Dalam budaya seperti ini, pemimpin tidak hanya menjadi pengarah, tetapi juga menjadi teladan dalam hal integritas, komitmen, dan inovasi.

Implementasi Praktis

Implementasi praktis dari konsep negara ideal Plato dalam pendidikan kepemimpinan menekankan pendekatan holistik untuk membentuk pemimpin yang adil, berintegritas, dan bijaksana. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai setiap elemen:

1. Pendidikan Etika

Pendidikan kepemimpinan harus dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral, seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan rasa empati terhadap sesama. Kurikulum yang efektif tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan manajerial dan kemampuan strategis, tetapi juga pada pembentukan karakter yang berlandaskan etika (Asri, 2024). Pemimpin masa depan perlu memahami dan menghormati prinsip-prinsip ini sebagai panduan utama dalam bertindak, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan keuntungan materi atau pencapaian kekuasaan, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

2. Pengembangan Berpikir Kritis

Peserta pendidikan kepemimpinan didorong untuk berpikir kritis dan terlibat aktif dalam proses dialektika, yaitu metode pembelajaran yang menekankan dialog terbuka dan pencarian kebenaran melalui perdebatan yang konstruktif (Baharizqi et al., 2023). Tradisi pemikiran kritis ala Plato, yang menekankan pentingnya menyelidiki argumen, memahami perspektif yang berbeda, serta mengevaluasi asumsi yang mendasarinya, menjadi model yang relevan untuk diterapkan. Dengan pendekatan ini, peserta diajak untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga menganalisis, mempertanyakan, dan mengintegrasikan berbagai sudut pandang untuk mencapai kesimpulan yang logis dan bertanggung jawab.

Dalam konteks kepemimpinan, kemampuan berpikir kritis ini sangat penting untuk menghadapi tantangan kompleks di dunia modern, di mana keputusan sering kali melibatkan banyak variabel dan dampak jangka panjang. Proses dialektika memungkinkan pemimpin untuk menggali akar masalah, mengidentifikasi peluang, serta merumuskan solusi yang inovatif dan inklusif (Sitti Chadidjah, Mohamad Erihadian, 2020). Selain itu, tradisi ini juga membangun keterampilan komunikasi yang efektif, mendorong pemimpin untuk menjadi pendengar yang baik, sekaligus mampu menyampaikan argumen secara jelas dan persuasif (Susyanto, 2022).

3. Pengujian Potensi

Dalam sistem Plato, setiap individu ditempatkan pada peran yang sesuai dengan potensi mereka (Plato, 2013). Plato menegaskan bahwa masyarakat akan berfungsi secara optimal jika setiap orang

menjalankan peran yang paling sesuai dengan kemampuan mereka. Untuk menerapkannya, pendidikan kepemimpinan harus melibatkan evaluasi kemampuan individu secara sistematis, seperti melalui tes kepribadian, simulasi kepemimpinan, dan penilaian kompetensi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menjalankan peran yang paling sesuai dengan keahlian mereka. Dengan demikian, program pendidikan kepemimpinan dapat mengidentifikasi kekuatan utama setiap peserta, sekaligus memberikan rekomendasi tentang peran atau posisi yang paling sesuai bagi mereka.

4. Pelatihan Berpikir Filosofis

Sejalan dengan konsep raja-filosof Plato, calon pemimpin diberi kesempatan untuk mendalami isu-isu moral, keberlanjutan, dan tanggung jawab global. Program pelatihan ini dapat mencakup diskusi tentang etika, studi kasus, atau refleksi filosofis. Melalui diskusi etika, calon pemimpin diajak untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dalam menghadapi dilema moral. Studi kasus memungkinkan mereka menganalisis dampak nyata dari keputusan strategis terhadap berbagai lapisan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Sementara itu, refleksi filosofis membantu mereka menyelami nilai-nilai universal, seperti keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga terlatih untuk menerapkan prinsip-prinsip moral dalam setiap keputusan yang mereka buat.

Kesimpulan

Konsep negara ideal menurut Plato berfokus pada pendidikan dan kebajikan sebagai landasan utama untuk mencapai keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Plato mengemukakan bahwa negara yang ideal harus dipimpin oleh seorang filsuf yang memiliki kapasitas intelektual dan moral yang tinggi, guna mengelola negara dengan keadilan. Pendidikan dalam pandangan Plato merupakan fondasi utama dalam membentuk individu yang unggul, tidak hanya dari segi intelektual tetapi juga dalam hal moralitas dan etika. Pendidikan filosofis yang diajarkan oleh Plato bertujuan menciptakan individu dengan kebijaksanaan (*sophia*), keberanian (*andreia*), pengendalian diri (*sophrosyne*), dan keadilan (*dikaiosyne*) sebagai pilar utama dalam membentuk pemimpin yang bijaksana dan adil.

Pendekatan ini sangat relevan diterapkan dalam konteks pendidikan kontemporer, khususnya dalam pendidikan kepemimpinan. Sistem pendidikan yang menekankan pada pengembangan karakter, kemampuan berpikir kritis, serta pemahaman nilai-nilai etika dapat menghasilkan pemimpin yang tidak hanya

cerdas tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip pendidikan Plato dapat berkontribusi pada pembentukan pemimpin yang mampu mengelola masyarakat secara adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip kebijakan yang universal.

Referensi

- Alkhadafi, R. (2024). Mengenal Etika dalam Perspektif Filsafat Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 4(3), 179-192. <https://doi.org/10.15575/jpiu.37087>
- Andariati, L. (2020). Filsafat Politik Plato. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 10(1), 88-115. <https://doi.org/10.15642/jrp.2020.10.1.88-115>
- Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair. (1990). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Kanisius.
- Asri. (2024). *Kajian pendidikan karakter dalam kurikulum perguruan tinggi: tren dan tantangan*. 119-133. <https://doi.org/https://doi.org/10.37476/massaro.v6i2.4958>
- Baharizqi, S. L., Muhtar, T., Herlambang, Y. T., Nur Fahrozy, F. P., Al-Kansa, B. B., Iswanda, M. L., Kamilah, N., & Herlambang, Y. T. (2023). Kompetensi Pedagogik Di Era Society 5.0: Sebuah Tinjauan Dalam Perspektif Pedagogik Kritis. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 13(2), 259. <https://doi.org/10.24114/esjpsd.v13i2.46286>
- Fauzi, A. (2017). Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Islam. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 42-53. <https://doi.org/10.31538/nidhomulhaq.v2i2.31>
- Fridayani, J. A. (2021). Kepemimpinan Adaptif Dalam Agilitas Organisasi Di Era Adaptasi Kebiasaan Baru. *Modus*, 33(2), 138-149. <https://doi.org/10.24002/modus.v33i2.4654>
- Harun Hadiwijoyo. (1993). *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*. Kanisius.
- K. Bertens, Johanis Ohoitumur, M. D. (2018). *Pengantar Filsafat*. PT Kanisius.
- Kaelan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Paradigma.
- Mahendra, R. B. (2021). Analisis Komparatif Pemikiran Filsafat Politik Al-Farabi Dan Platon. *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 20(2), 114-133. <https://doi.org/10.14421/ref.v20i2.2493>
- Mohammad Hatta. (1996). *Alam Pikiran Yunani*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Plato. (2013). *The Republic*. Roman Roads Media, LLC.
- Priyanto, A. (2020). Pendidikan Islam dalam Era Revolusi Industri 4.0. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 80-89. <https://doi.org/10.18860/jpai.v6i2.9072>
- Roswanto, A. (2015). Filsafat Sosial-Politik Plato dan Aristoteles. *Refleksi*

Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam, 15(2).

- SARTINI, S., CHONDRO, A., PRAYITNO, H. J., & CHAIRUNISSA, I. (2024). TANTANGAN KEPEMIMPINAN ADAPTIF DALAM DUNIA PENDIDIKAN DI ERA GENERASI MILENIAL. *TEACHING : Jurnal Inovasi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 4(2), 98–110. <https://doi.org/10.51878/teaching.v4i2.3047>
- Setiawan, A. (2021). Filsafat Pendidikan Politik Plato Sebagai Cara Untuk Menyiapkan Calon Pemimpin Indonesia. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 13(1), 93–106. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i1.685>
- Sitti Chadidjah, Mohamad Erihadian, A. S. (2020). Pendidikan Islam Abad 21. *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 80–97.
- Susyanto, B. (2022). Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Era Digital. *AlMadrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(3), 692. <https://doi.org/10.35931/am.v6i3.1072>
- Syaiful Sagala. (2018). *Pendekatan dan Model Kepemimpinan*. Prenadamedia Grup.
- Taufik, M. (2018). Etika Plato dan Aristoteles: Dalam Perspektif Etika Islam. *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 18(1), 27–45. <https://doi.org/10.14421/ref.v18i1.1855>